



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

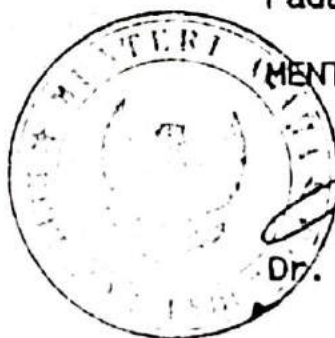
Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH**

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KET.
			URUT MAD				
1	D.I. Aceh	A. IBTIDAIYAH					
		1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lam Puuk	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Lam Puuk Ds. MeunasahKec. Lhoknga/ Leupung Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Durong	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Durong Ds. Durong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jantho	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Ibrahimiyah Ds. Lampjruen Kec. Seulimeum	Kab. Aceh Besar	
		4	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasi Janeng	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Pasi Janeng Ds. Pasi Janeng Kec. Pulo Aceh	Kab. Aceh Besar	
		5	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meurau	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Meurau Ds. Meurau Kec. Indrapuri	Kab. Aceh Besar	
		6	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telaga Meuku	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Telaga Meuku Ds. Telaga Meuku Kec. Bendahara Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur	
		7	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Ara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Blang Ara Ds. Blang Ara Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	
		8	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Rheum	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Blang Rheum Ds. Blang Rheum Kec. Jeumpa Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	
		9	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cot Ara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Cot Ara Ds. Cot Ara Kec. Gandapura Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	
		10	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keude Krueng	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Keude Krueng Ds. Krueng Seunong Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KET.
		URUT	MAD				
		56	56	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Bintang Ds. Kuala II Bintang Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	
		57	57	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Drien Tujoh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Drien Tujoh Ds. Alue Sane Kec. Bandar Dua Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		58	58	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tiba	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Tiba Ds. Tiba Kec. Mutiara Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		59	59	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pante Raja	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Pante Raja Ds. Mesjid Raja Kec. Trieng Gading Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		60	60	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Labui	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Labui Ds. Labui Kec. Pidie Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		61	61	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tiro	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Tiro Ds. Mancang Kec. Tiro/ Truseb Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		62	62	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulo Kawa	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Pulo Kawa Ds. Pulo Kawa Kec. Tangse Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		63	63	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keude Batee	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Keude Batee Ds. Tuha Kec. Batee Kab. Pidie	Kab. Pidie	
		64	64	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Ulim	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Tanjung Ulim Ds. Tanjung Ulim Kec. Ulim	Kab. Pidie	
		65	65	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beuracan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Beuracan Ds. Beuracan Kec. Meureudu	Kab. Pidie	
		66	66	Madrasah Ibtidaiyah Negeri le Leubeu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial le Leubeu Ds. le leubeu Kec. Kembang Tanjung	Kab. Pidie	



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 670 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 65 (Enam Puluh Lima) Madrasah Aliyah Negeri, 103 (Seratus Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 430 (Empat Ratus Tiga Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

132	Aceh	MIN Keude Neulop	MIN 4 Nagan Raya
133	Aceh	MIN Sukaraja	MIN 5 Nagan Raya
134	Aceh	MIN Suak Bilie	MIN 6 Nagan Raya
135	Aceh	MIN Kuala Tadu	MIN 7 Nagan Raya
136	Aceh	MIN Le Beudoh	MIN 8 Nagan Raya
137	Aceh	MIN Gunong Reubo	MIN 9 Nagan Raya
138	Aceh	MIN Cot Jawi	MIN 10 Nagan Raya
139	Aceh	MIN Mon Dua	MIN 11 Nagan Raya
140	Aceh	MIN Blang Teungoh	MIN 12 Nagan Raya
141	Aceh	MIN Kuala Tuha	MIN 13 Nagan Raya
142	Aceh	MIN UPT II Lamie	MIN 14 Nagan Raya
143	Aceh	MIN Peukan Cunda	MIN 1 Kota Lhokseumawe
144	Aceh	MIN Blang Mane 2	MIN 2 Kota Lhokseumawe
145	Aceh	MIN Kuta Blang Lhokseumawe	MIN 3 Kota Lhokseumawe
146	Aceh	MIN Lhokseumawe	MIN 4 Kota Lhokseumawe
147	Aceh	MIN Meuria Paloh	MIN 5 Kota Lhokseumawe
148	Aceh	MIN MEUREUDU	MIN 1 Pidie Jaya
149	Aceh	MIN KUTA REUNTANG	MIN 2 Pidie Jaya
150	Aceh	MIN KUTA BATEE	MIN 3 Pidie Jaya
151	Aceh	MIN KUTA SIMPANG	MIN 4 Pidie Jaya
152	Aceh	MIN BABAH JURONG	MIN 5 Pidie Jaya
153	Aceh	MIN BEURACAN I	MIN 6 Pidie Jaya
154	Aceh	MIN BANDAR BARU	MIN 7 Pidie Jaya
155	Aceh	MIN BLANG BARO	MIN 8 Pidie Jaya
156	Aceh	MIN PARU	MIN 9 Pidie Jaya
157	Aceh	MIN PANGWA	MIN 10 Pidie Jaya
158	Aceh	MIN DAYAH BAROH	MIN 11 Pidie Jaya
159	Aceh	MIN TANJONG ULIM I	MIN 12 Pidie Jaya
160	Aceh	MIN ULEE GLE	MIN 13 Pidie Jaya
161	Aceh	MIN MEUGIT	MIN 14 Pidie Jaya
162	Aceh	MIN JANGKA BUYA	MIN 15 Pidie Jaya
163	Aceh	MIN KUTA KRUENG	MIN 16 Pidie Jaya
164	Aceh	MIN JEULANGA	MIN 17 Pidie Jaya
165	Aceh	MIN TANJONG ULIM II	MIN 18 Pidie Jaya
166	Aceh	MIN DRIEN TUJOH	MIN 19 Pidie Jaya
167	Aceh	MIN TRIENGGADENG	MIN 20 Pidie Jaya